



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 29 NOVEMBER 2022



RINGKASAN BERITA HARI INI

PEMKAB

Pemetaan Kebutuhan SDM untuk Optimalisasi Pembangunan

KOTA—Untuk optimalisasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kabupaten Sidoarjo, DPRD mendorong untuk melakukan pemetaan. Kebutuhan SDM dihitung berdasarkan visi dan arah pembangunan Kota Delta ke depan. Selain itu juga dengan mempertimbangkan tantangan perkembangan zaman.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto mengatakan, hasil pemetaan dengan basis data yang jelas serta metode ilmiah yang jelas pula akan mempermudah penyusunan rencana aksi pembangunan. "Yakni dengan memanfaatkan seluruh potensi pendidikan yang ada di Sidoarjo secara lebih presisi," katanya.

Mulai dari keberadaan satuan pendidikan. Baik dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Serta lembaga atau balai pelatihan vokasi yang ada di Sidoarjo.

Di samping itu juga bisa dengan memproyeksikan keberadaan dan kebutuhan sumber daya pendidikan. Baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikannya.

Menurut dia, dengan pola yang terintegrasi dan jelas tujuannya, maka kerja-kerja penyelenggaraan pendidikan akan dapat optimal. "Untuk menyongsong kemajuan Sidoarjo dengan tersedianya SDM yang relevan sesuai dengan kebutuhan daerah," ujarnya. (nis/vga)



Ketua DPRD: Media Harus Siap Kawal dan Menjadi Mediator Setiap Pembangunan di Sidoarjo



MASIH BISA LEMAH? Selama pembangunan flyover Krian, Sidoarjo, Jalan Kyal Mega harus tetap siap seperti yang terlihat kemarin. Namun, ketika pekerjaan badan jalan, pekerjaan akan dilakukan secara total.

Pembangunan Flyover Krian Masih dalam Tahap Fondasi

SIDOARJO—Pembangunan flyover Krian terus digigit. Saat ini pengerjaan tengah memasuki tahap perancangan fondasi. Karena flyover cukup panjang, pemindahan lokasi akan memakan waktu yang lumayan lama. Rencana, panjang flyover Krian mencapai 700 meter ditambah masing-masing 100 meter di kasau dan kiri kanan turunan. Total semuanya adalah 900 meter.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU/BMSDA) Dwi Ika Septono mengatakan, di sisi utara flyover yang panjang sudah terpasang. "Saat ini pekerja masih mengerjakan fondasi, sehingga jalan Kyal Mega di lokasi pembangunan flyover tersebut masih dibuka sementara," katanya. Belum sampai ada

penetapan jalan secara total baru dilakukan sebelum dipas saat pekerjaan badan jalan flyover dilakukan. "Kendati sudah koordinasi dengan pembaruan proyeknya. Secara umum ada persiapan total saat mulai pekerjaan struktur akan badan jembatan," ungkapnya. Saat ini jalan masih dibuka sebagian karena pihaknya sudah merencanakan pematangan ulang yang tidak mengganggu seluruh Jalan Kyal Mega.

Saat persiapan total tahun depan, diharapkan keancaman tidak terjadi di Jalan Kemanggisan yang saat ini sudah hampir selesai di beton. "Jadi, nanti jalan Kemanggisan sudah selesai dan bisa dilewati. Harapannya bisa jadi jalan alternatif tambahan sehingga tidak menambah kemacetan," paparnya.

menjajanya sebelum melakukan pekerjaan. "Kami dengan padakana apokah, apabila masih memungkinkan dan tidak mengganggu keselamatan, jalan tidak ditutup total," ujarnya. Analisis, aspek baik untuk pengendali maupun pekerja. "Jadi, tidak semuanya ditutup total. Moment tertentu saja saat dimana pekerjaan akan merembeskan, jika jalan tidak ditutup," terangnya.

Fibahnya juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Sidoarjo jika nantinya ada penutupan total. Agar saat penutupan tidak terjadi dan penutupan akhirnya Dwi Ika Septono, saat ini flyover tersebut sudah terbagun sesuai target. Akhir Desember 2023 seluruh pembangunan fondasi selanjutnya bisa bisa diawali pada

SEPUTAR FLYOVER KRIAN

- Pajuk Flyover Rencanakan Perbaikan di
- Anggaran pembangunan senilai Rp 151 miliar
- Panjang jalan layang 700 meter dan kasau ke utara, ditambah 100 meter masing-masing untuk kasau kanan flyover
- Diperkirakan akan 91 Wajar Karya Persepsi Tbk
- Mulut di atas tol ke arah utara Km 38-400 jalan Surabaya-Sidoarjo melalui Jalan Raya Maja, Krian
- Pembangunan ditargetkan selesai Desember 2023

Penerimaan Pajak



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam acara pemberian penghargaan 2022 pemerintah daerah.

Pembangunan Capai 102,17 Persen

SIDOARJO—Realisasi penerimaan pajak daerah Pemkab Sidoarjo sudah mencapai 102,17 persen. Total penerimaan pajak per 27 November ini mencapai sebesar Rp 1,051 triliun lebih besar dari target yang ditetapkan yakni Rp 1,058 triliun. Perolehan pajak dari sembilan jenis pajak daerah itu yang paling tinggi realisasinya yakni pajak BPHTB sebesar Rp 375,76 miliar atau 114,39 persen kemudian disusul Pajak Parkir sebesar Rp 36,315 miliar atau 108,77 persen.

Pajak Hiburan sebesar Rp 5,882 miliar atau 106,95 persen, Pajak Hotel sebesar Rp 17,989 atau 102,80 persen, selanjutnya Pajak PBB, Pajak Air Tanah masing-masing sudah mencapai 100 persen. Sedangkan pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklamasi dan Pajak Restoran realisasinya masih belum sampai 100 persen dan balai dimaksimalkan di bulan Desember nanti.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengapresiasi kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) yang telah bekerja maksimal dalam memaksimalkan pungutan pajak daerah. Orang nomor satu di Sidoarjo itu mengatakan bahwa penerimaan pajak lebih dari Rp 1 triliun itu kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan.

"Mulai tahun 2023 sampai dengan 2024 nanti pembangunan di berbagai bidang dimaksimalkan. Proyek pembangunan infrastruktur yang banyak menyedot anggaran seperti proyek Frontage Road, Jalan Beton, pembangunan RSUD Sidoarjo Barat, penambahan 4 Puskesmas, dan proyek 2 unit sekolah SMPN 2 Tulangan dan SMPN 2 Prambon," terang Gus Muhdlor. Senin, (26/11/22).

Pajak yang dipungut dari 9 jenis pajak daerah itu, lanjut Gus Muhdlor, yang harus dioptimalkan lagi yakni pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Ketiganya belum mencapai target 100 persen.

"Untuk jenis pajak di luar tiga itu semuanya bagus, sudah mencapai 100 persen, bahkan pajak BPHTB penerimaannya sampai 114,39 persen. Penerimaan pajak tahun 2022 sudah melebihi target dan realisasinya sampai akhir tahun bisa bertambah lagi, terutama yang tiga jenis pajak belum sampai target tadi," jelas bupati alumnus SMAN 4 Sidoarjo itu.

Sementara Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo Ari Suryono menyampaikan, tercapainya target penerimaan pajak tahun 2022 itu dimungkinkan dengan optimalisasi sosialisasi kepada para wajib pajak (WP). Selain itu, adanya fasilitas pelaporan pajak online yang disiapkan BPPD.

Ari juga menjelaskan, dengan memberikan kemudahan kepada WP dalam melakukan transaksi pembayaran pajak melalui online perubahannya signifikan. Seperti Pajak Restoran dan Pajak Hotel. "Kemudahan transaksi pembayaran pajak online ini yang terus dorong. Kita sosialisasikan kepada para WP agar saat membayar pajak tidak diakhiri raut," jelasnya.

"Untuk tiga jenis pajak yang belum sampai 100 persen, akan dimaksimalkan di bulan Desember ini," pungkasnya. • Loe

Penerimaan Pajak Capai 102,17 Persen, Bupati Muhdlor Tegaskan untuk Pembangunan Infrastruktur



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (kanan) menerima penghargaan sebagai Pemeringkat Pajak Bumi dan Bangunan-Pajak Restoran (PBB-PRT).

KOTA—Realisasi penerimaan pajak daerah Pemkab Sidoarjo sudah mencapai 102,17 persen. Total penerimaan pajak per 27 November ini mencapai Rp 1,051 triliun lebih besar dari target yang ditetapkan yakni Rp 1,058 triliun. Perolehan pajak dari sembilan jenis pajak daerah itu yang paling tinggi realisasinya yakni pajak BPHTB sebesar Rp 375,76 miliar atau 114,39 persen. Kemudian disusul Pajak Parkir sebesar Rp 36,315 miliar atau 108,77 persen, Pajak Hiburan sebesar Rp 5,882 miliar atau 106,95 persen, Pajak Hotel Rp 17,989 miliar atau 102,80 persen,

Jenis Pajak	Realisasi (Rp Miliar)	Target (Rp Miliar)	Persentase (%)
Pajak BPHTB	375.76	328.00	114.39
Pajak Parkir	36.315	33.30	108.77
Pajak Hiburan	5.882	5.410	106.95
Pajak Hotel	17.989	17.400	102.80
Pajak PBB	100.000	100.000	100.00
Pajak Air Tanah	100.000	100.000	100.00
Penerangan Jalan	100.000	100.000	100.00
Pajak Reklamasi	100.000	100.000	100.00
Pajak Restoran	100.000	100.000	100.00

UMK Sidoarjo ke Gubernur

SIDOARJO—Besaran upah minimum kabupaten (UMK) Sidoarjo tahun 2023 sampai saat ini belum diputuskan. Meski demikian, pemetaan UMK daerah mundur dari 31 November menjadi 7 Desember. Rencana, hari ini (29/11) usulan UMK Sidoarjo 2023 baru disampaikan ke Gubernur Jatim Khafid Indar Parawansa. Hanya, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai UMK yang akan disampaikan ke gubernur.

Definisi data Ditaker Sidoarjo ada 281 badan usaha dan individu yang terdapat. "Jadi itu bukan berarti tetap pemenuhannya saja, tapi sudah tidak di Sidoarjo lagi," ungkapnya. Bina memang sudah tidak beroperasi atau pindah ke daerah lain. "Itu perhitungan selama 2022 saja. Sejak awal tahun sampai saat ini," ujarnya. Jumlah itu meliputi perusahaan skala menengah, besar, dan kecil.

Ajurn menyebut, pemerintah tidak sedang mendiskusikan kenaikan upah. Namun, bagaimana keberlangsungan perusahaan agar tidak sampai ada PHK massal. Kabid Hubungan Industrial (HI) Sidoarjo Anwar Kholifin mengatakan, berita acara rapat bersama

elemen pengusaha dan buruh yang dipaparkan ke DPRD HI. "Jadi ini bukan berarti tetap pemenuhannya saja, tapi sudah tidak di Sidoarjo lagi," ungkapnya. Bina memang sudah tidak beroperasi atau pindah ke daerah lain. "Itu perhitungan selama 2022 saja. Sejak awal tahun sampai saat ini," ujarnya. Jumlah itu meliputi perusahaan skala menengah, besar, dan kecil.

Siswa Smanor Jatim Berdemo Minta Kepala Sekolahnya Diganti



Sidoarjo, Jatim—Usai pagelaran seni 2021/2022 di SMPN 1 Sidoarjo, ratusan siswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung SMPN 1 Sidoarjo. Mereka membawa karung-karung berisi sampah dan kertas-kertas bekas yang mereka gunakan untuk menutupi pintu masuk gedung SMPN 1 Sidoarjo. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes siswa terhadap kepala sekolah yang dinilai tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekolah.

Para siswa mengatakan, kepala sekolah yang dinilai tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekolah. Mereka merasa kecewa karena sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar yang nyaman, justru menjadi tempat yang kotor dan tidak sehat. Mereka meminta kepala sekolah diganti dengan orang yang lebih peduli terhadap lingkungan sekolah.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PARIWARA SEPUTAR KEGIATAN DPRD SIDOARJO



Ketua H. Usman M. Kes, Wakil Ketua Bambang Rhyoko SE, Kayan SH, DR. Emik Firdausi ST.MM



PAPARAN - Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman M Kes dan anggota Komisi D, Rizza Ali Faizin menyampaikan paparan saat Bimtek Sinergitas Insan Pers dan Pemkab Sidoarjo yang diikuti 105 wartawan selama dua hari di Pop Hotel, Yogyakarta pekan kemarin

Ketua DPRD: Media Harus Siap Kawal dan Menjadi Mediator Setiap Pembangunan di Sidoarjo

CS Dipindai dengan CamScanner



Ketua DPRD: Media Harus Siap Kawal dan Menjadi Mediator Setiap Pembangunan di Sidoarjo

Sidoarjo, Memo X

Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo mengajak seluruh media yang melaksanakan liputan di Sidoarjo untuk bisa mengawal dan menjadi mediator dalam setiap pembangunan di Sidoarjo. Hal ini, untuk menguatkan hubungan harmoni dan sinergitas antara media, Pemkab dan DPRD Sidoarjo yang selama ini terjaga dengan baik.

"Setiap media yang menempatkan personilnya bertugas di wilayah Sidoarjo, harus siap mengawal dan menjadi mediator dalam setiap pembangunan di Sidoarjo. Ini demi sinergitas bersama yang telah kita bangun selama beberapa tahun terakhir," ujar Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman M Kes saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) sekaligus menjadi narasumber di Pop Hotel, Yogyakarta, Kamis (17/11/2022) malam pekan kemarin.

Selama ini, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, media sudah bernitratu dengan Pemkab dan DPRD Sidoarjo.

Karena itu, sudah selayaknya setiap tahun mendapatkan Bimtek demi kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) kru media yang bertugas di Sidoarjo dalam menyajikan berita-berita yang faktual dan berimbang. Apalagi, anggaran Bimtek selama ini juga selalu dikawal anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo terutama yang menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.

"Nah, kemitraan ini harus terus dijaga. Karena sebaik apa pun pembangunan di Sidoarjo tanpa diberitakan media, maka sudah dipastikan suksesi pembangunan informasi masyarakat Sidoarjo secara utuh dan komprehensif," imbuhan mantan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo ini.

Saat pelaksanaan Bimtek misalnya, lanjut pria yang akrab disapa Abah Usman ini sarana, prasarana dan fasilitas yang didapat kru media juga selayaknya setara yang diterima anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo maupun Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) lain saat mengikuti Bimtek peningkatan SDM. Alasannya, karena

"Tempat dan fasilitas media (wartawan) selama Bimtek minimal setara perangkat OPD

Kecamatan Sedati ini.

Hal senada disampaikan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin. Menurut Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sidoarjo ini menilai sudah selayaknya kemitraan media dengan Pemkab dan DPRD Sidoarjo diperkuat. Alasannya, karena para pejabatnya sebagian besar adalah berasal dari PKB.

Rizza menyebutkan Bupati Sidoarjo dan Wabup dari PKB, Ketua DPRD juga dari PKB dan dirinya sendiri juga dari PKB. "Kemitraan dan sinergi ke depan dengan media harus diperbaiki lagi. Agar kemitraan yang selama ini terjalin bisa terus dipupuk dengan baik," jelas Rizza yang juga Ketua PC GP Ansor Sidoarjo ini.

Bagi Rizza saat ada masalah pembangunan di lapangan tidak hanya disampaikan ke DPRD Sidoarjo. Melainkan bisa disampaikan ke media. Kemudian permasalahan lapangan itu bisa langsung ditindaklanjuti dengan hearing melibatkan komisi-komisi yang ada di DPRD

Sidoarjo.

"Jadi kalau masalah itu sudah diangkat di media, tidak perlu ada demo. Cukup langsung dibuatkan hearing melibatkan komisi terkait untuk dicarikan solusinya. Artinya pembangunan tetap jalan dan solusi bagi warga yang merasa keberatan atas pembangunan itu misalnya tetap ada solusinya," ungkap politisi PKB asal Tulangan ini.

Sementara Plt Kepala Dinas Kominfo Pemkab Sidoarjo, Didik Tri Wahyudi mengaku siap bakal terus memfasilitasi seluruh media di Sidoarjo. Tujuannya agar kemitraan yang terbangun tetap berjalan harmoni.

"Karena diakui atau tidak, Pemkab Sidoarjo sangat membutuhkan media dalam mensosialisasikan semua program kerja dan pembangunan di Sidoarjo untuk disampaikan ke warga Sidoarjo dan sekitarnya," tandasnya. (Adv/par/wan/man)



peran media sangat penting dalam mengawal semua program pembangunan yang ada di Sidoarjo.

lainnya. Karena peran media sangat penting dalam mengawal semua program Pemkab Sidoarjo," tegas politisi PKB asal

CS Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PARIWARA SEPUTAR KEGIATAN DPRD SIDOARJO



Ketua H. Usman M. Kes, Wakil Ketua Bambang Rhyoko SE, Kayan SH, DR. Emik Firdaus ST.MM



PAPARAN - Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman M Kes dan anggota Komisi D, Rizza Ali Faizin menyempatkan paparan saat Bimtek Sinergitas Insan Pers dan Pemkab Sidoarjo yang diikuti 105 wartawan selama dua hari di Pop Hotel, Yogyakarta pekan kemarin

Ketua DPRD: Media Harus Siap Kawal dan Menjadi Mediator Setiap Pembangunan di Sidoarjo

CS Dipindai dengan CamScanner



Ketua DPRD: Media Harus Siap Kawal dan Menjadi Mediator Setiap Pembangunan di Sidoarjo

Sidoarjo, Memo X

Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo mengajak seluruh media yang melaksanakan liputan di Sidoarjo untuk bisa mengawal dan menjadi mediator dalam setiap pembangunan di Sidoarjo. Hal ini, untuk menguatkan hubungan harmoni dan sinergitas antara media, Pemkab dan DPRD Sidoarjo yang selama ini terjaga dengan baik.

"Setiap media yang menempatkan personilnya bertugas di wilayah Sidoarjo, harus siap mengawal dan menjadi mediator dalam setiap pembangunan di Sidoarjo. Ini demi sinergitas bersama yang telah kita bangun selama beberapa tahun terakhir," ujar Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman M Kes saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) sekaligus menjadi narasumber di Pop Hotel, Yogyakarta, Kamis (17/11/2022) malam pekan kemarin.

Selama ini, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, media sudah bernitratu dengan Pemkab dan DPRD Sidoarjo.

Karena itu, sudah selayaknya setiap tahun mendapatkan Bimtek demi kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) kru media yang bertugas di Sidoarjo dalam menyajikan berita-berita yang faktual dan berimbang. Apalagi, anggaran Bimtek selama ini juga selalu dikawal anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo terutama yang menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.

"Nah, kemitraan ini harus terus dijaga. Karena sebaik apa pun pembangunan di Sidoarjo tanpa diberitakan media, maka sudah dipastikan suksesi pembangunan informasi masyarakat Sidoarjo secara utuh dan komprehensif," imbuh mantan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo ini.

Saat pelaksanaan Bimtek misalnya, lanjut pria yang akrab disapa Abah Usman ini sarana, prasarana dan fasilitas yang didapat kru media juga selayaknya setara yang diterima anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo maupun Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) lain saat mengikuti Bimtek peningkatan SDM. Alasannya, karena

"Tempat dan fasilitas media (wartawan) selama Bimtek minimal setara perangkat OPD

Kecamatan Sedati ini.

Hal senada disampaikan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin. Menurut Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sidoarjo ini menilai sudah selayaknya kemitraan media dengan Pemkab dan DPRD Sidoarjo diperkuat. Alasannya, karena para pejabatnya sebagian besar adalah berasal dari PKB.

Rizza menyebutkan Bupati Sidoarjo dan Wabup dari PKB, Ketua DPRD juga dari PKB dan dirinya sendiri juga dari PKB. "Kemitraan dan sinergi ke depan dengan media harus diperbaiki lagi. Agar kemitraan yang selama ini terjalin bisa terus dipupuk dengan baik," jelas Rizza yang juga Ketua PC GP Ansor Sidoarjo ini.

Bagi Rizza saat ada masalah pembangunan di lapangan tidak hanya disampaikan ke DPRD Sidoarjo. Melainkan bisa disampaikan ke media. Kemudian permasalahan lapangan itu bisa langsung ditindaklanjuti dengan hearing melibatkan komisi-komisi yang ada di DPRD

Sidoarjo.

"Jadi kalau masalah itu sudah diangkat di media, tidak perlu ada demo. Cukup langsung dibuatkan hearing melibatkan komisi terkait untuk dicarikan solusinya. Artinya pembangunan tetap jalan dan solusi bagi warga yang merasa keberatan atas pembangunan itu misalnya tetap ada solusinya," ungkap politisi PKB asal Tulangan ini.

Sementara Plt Kepala Dinas Kominfo Pemkab Sidoarjo, Didik Tri Wahyudi mengaku siap bakal terus memfasilitasi seluruh media di Sidoarjo. Tujuannya agar kemitraan yang terbangun tetap berjalan harmoni.

"Karena diakui atau tidak, Pemkab Sidoarjo sangat membutuhkan media dalam mensosialisasikan semua program kerja dan pembangunan di Sidoarjo untuk disampaikan ke warga Sidoarjo dan sekitarnya," tandasnya. (Adv/par/wan/man)



peran media sangat penting dalam mengawal semua program pembangunan yang ada di Sidoarjo.

lainnya. Karena peran media sangat penting dalam mengawal semua program Pemkab Sidoarjo," tegas politisi PKB asal

CS Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

RADAR SIDOARJO

■ PEMKAB

Pemetaan Kebutuhan SDM untuk Optimalisasi Pembangunan

KOTA-Untuk optimalisasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kabupaten Sidoarjo, DPRD mendorong untuk melakukan pemetaan. Kebutuhan SDM dihitung berdasarkan visi dan arah pembangunan Kota Delta ke depan. Selain itu juga dengan mempertimbangkan tantangan perkembangan zaman.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto mengatakan, hasil pemetaan dengan basis data yang jelas serta metode ilmiah yang jelas pula akan mempermudah penyusunan rencana aksi pembangunan. "Yakni dengan memanfaatkan seluruh potensi pendidikan yang ada di Sidoarjo secara lebih presisi," katanya.

Mulai dari keberadaan satuan pendidikan. Baik dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Serta lembaga atau balai pelatihan vokasi yang ada di Sidoarjo.

Di samping itu juga bisa dengan memproyeksikan keberadaan dan kebutuhan sumber daya pendidikan. Baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikannya.

Menurut dia, dengan pola yang terintegrasi dan jelas tujuannya, maka kerja-kerja penyelenggaraan pendidikan akan dapat optimal. "Untuk menyongsong kemajuan Sidoarjo dengan tersedianya SDM yang relevan sesuai dengan kebutuhan daerah," ujarnya. (nis/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner

Penerimaan Pajak



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam acara pemberian penghargaan pajak pemerintah desa.

Pemkab Capai 102,17 Persen

SIDOARJO - Realisasi penerimaan pajak daerah Pemkab Sidoarjo sudah mencapai 102,17 persen. Total penerimaan pajak per 27 November kemarin sebesar Rp.1,091 triliun lebih besar dari target yang ditetapkan yakni Rp. 1,068 triliun. Perimaan pajak dari sembilan jenis pajak daerah itu yang paling tinggi realisasinya yakni pajak BPHTB sebesar Rp. 379, 761 miliar atau 114, 39 persen kemudian disusul Pajak Parkir sebesar Rp.16,315 miliar atau 108,77 persen.

Pajak Hiburan sebesar Rp. 5,882 miliar atau 106,95 persen, Pajak Hotel sebesar Rp. 17, 989 atau 102, 80 persen, selanjutnya Pajak PBB, Pajak Air Tanah masing-masing sudah mencapai 100 persen. Sedangkan pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran realisasinya masih belum sampai 100 persen dan bakal dimaksimalkan di bulan Desember nanti.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengapresiasi kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) yang telah bekerja maksimal dalam memaksimalkan pungutan pajak daerah. Orang nomor satu di Sidoarjo itu menegaskan bahwa penerimaan pajak lebih dari Rp. 1 triliun itu kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan.

"Mulai tahun 2021 sampai dengan 2024 nanti pembangunan diberbagai bidang dimaksimalkan. Proyek pembangunam infrastruktur yang banyak menyedot anggaran seperti proyek Frontage Road, Jalan Beton, pembangunan RSUD Sidoarjo Barat, penambahan 4 Puskesmas, dan proyek 2 unit sekolah SMPN 2 Tulangan dan SMPN 2 Prambon," terang Gus Muhdlor. Senin, (28/11/22).

Pajak yang dipungut dari 9 jenis pajak daerah itu, lanjut Gus Muhdlor, yang harus dioptimalkan lagi yakni pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Ketiganya belum mencapai target 100 persen.

"Untuk jenis pajak di luar tiga itu semuanya bagus, sudah mencapai 100 persen, bahkan pajak BPHTB penerimaannya sampai 114, 39 persen. Penerimaan pajak tahun 2022 sudah melebihi target dan realisasinya sampai akhir tahun bisa bertambah lagi, terutama yang tiga jenis pajak belum sampai target tadi," jelas bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo itu.

Sementara Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo Ari Suryono menyampaikan, tercapainya target penerimaan pajak tahun 2022 itu ditunjang dengan optimalisasi sosialisasi kepada para wajib pajak (WP). Selain itu, adanya fasilitas pelaporan pajak online yang disiapkan BPPD.

Ari juga menjelaskan, dengan memberikan kemudahan kepada WP dalam melakukan transaksi pembayaran pajak melalui online perubahannya signifikan. Seperti Pajak Restoran dan Pajak Hotel.

"Kemudahan transaksi pembayaran pajak online ini yang terus kita dorong, kita sosialisasikan kepada para WP agar saat membayar pajak tidak diakhir waktu," jelasnya.

"Untuk tiga jenis pajak yang belum sampai 100 persen, akan dimaksimalkan di bulan Desember ini," pungkasnya. • Loe

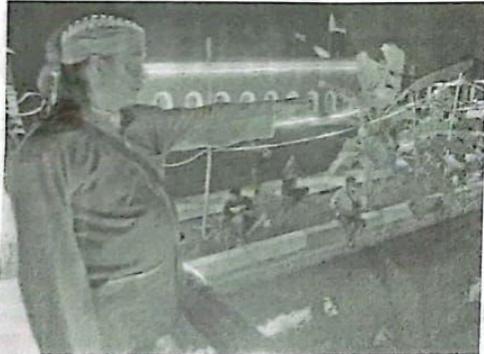
Dipindai dengan CamScanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pengembangan Potensi Desa Perlu Digenjot Lagi



BARU: Salah satu tempat wisata yang ada di Desa Gelam, Kecamatan Candi.

KOTA-Pemkab Sidoarjo diminta untuk mengoptimalkan potensi desa. Tujuannya agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sebab potensi desa di Kota Delta sangat menjanjikan dan tidak kalah dengan daerah lain.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman melihat setiap desa memiliki potensi unggulan. Seperti perkebunan, perikanan, maupun potensi wisata.

Menurutnya, potensi-potensi tersebut harus dioptimalkan agar semakin berkembang. Sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat desa.

Pihaknya juga meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta instansi terkait lainnya untuk turun tangan membantu pembinaan. "Agar potensi di setiap desa dapat dikembangkan dengan baik," ujarnya.

Dia melanjutkan, selain pembinaan, pemerintah daerah juga harus membantu mendukung hasil dari desa dan mempromosikannya secara luas. Agar pemasaran hasil produksi akan semakin mudah dan membawa manfaat besar bagi masyarakat desa dan juga dikenal secara luas.

Politikus PKS tersebut me-

ngatakan pengembangan potensi desa akan berdampak positif. Jika nantinya menjadi sumber pemasukan bagi desa. Dampak positif juga akan dirasakan masyarakat dalam hal ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga juga dapat mengurangi angka pengangguran di desa.

Adit menyebutkan, pembangunan di desa harus terus didorong dan terus ditingkatkan. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga di bidang ekonomi kerakyatan. "Agar kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa juga dapat meningkat," imbuhnya. (nis/vga)

Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

UMP Jatim 2023 Ditetapkan Rp 2.040.244

UMK Diumumkan Paling Lambat 7 Desember 2022

SURABAYA – Setelah proses panjang pembahasan, upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur (Jatim) tahun 2023 akhirnya ditetapkan. Nilainya naik 7,8 persen atau Rp 148.677 dibanding tahun ini. Dengan demikian, UMP Jatim 2023 sebesar Rp 2.040.244.

Kenaikan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2023. Pemprov meminta seluruh pihak mematuhi peraturan tersebut. Dalam SK itu, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2023 dilarang mengurangi atau menurunkan nilainya. "Dilarang juga membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP 2023," tegas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kemarin (28/11).

Kenaikan UMP 2023, jelas Kho-

fifah, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. "Persentase kenaikan sejumlah 7,8 persen ini telah sesuai aturan menteri ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kenaikan nilai upah minimum tahun depan tidak boleh melebihi 10 persen. Ini tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Permenaker tersebut," tambah Khofifah. Menurut dia, peraturan itu berlaku mulai 1 Januari 2023.

Ada juga instruksi untuk seluruh kabupaten/kota. Mereka diminta menyesuaikan nilai UMP dalam penyusunan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Nilai UMK 38 kabupaten/kota tidak boleh di bawah angka yang baru ditetapkan.

Saat ini, lanjut Khofifah, penetapan memang baru sebatas UMP. Nilai UMK tiap-tiap kabupaten/kota belum disampaikan. Pengumuman terkait UMK 2023 akan disampaikan paling lambat 7 Desember 2022. "Kita berupaya semaksimal mung-

kin memutuskan UMP secara berkeadilan. Adil bagi karyawan dan pelaku usaha," tuturnya.

Khofifah menyebutkan bahwa Pemprov Jatim telah menerima aspirasi dari serikat buruh atau pekerja yang menginginkan kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen. Selanjutnya, dia dan tim juga mendengar aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). "Sebagaimana diketahui, ada sektor usaha tertentu yang ekspornya terdampak kelesuan ekonomi sehingga terjadi penurunan permintaan cukup signifikan," katanya.

Mantan menteri sosial itu berharap penetapan UMP 2023 dapat menjaga daya beli buruh/pekerja di tengah penyesuaian harga setelah kenaikan harga BBM. Kenaikan UMP juga diharapkan mendorong masyarakat hidup layak.

Ketua Apindo Jatim Eddy Wijanarko mengaku sudah menerima salinan penetapan UMP tersebut. Dia juga sudah mengetahui bahwa gubernur memakai Permenaker 18/2022 sebagai acuan. "Saat ini kami masih menunggu perkembangan dari DPP," ujarnya. (hen/elo/c9/oni)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



MASIH BISA LEWAT: Selama pembangunan fondasi flyover Krian, Sidoarjo, Jalan Kyai Mojo hanya separo yang ditutup seperti yang terlihat kemarin. Namun, ketika pengerjaan badan jalan, penutupan akan dilakukan secara total.

Pembangunan Flyover Krian Masih dalam Tahap Fondasi

SIDOARJO - Pembangunan flyover Krian terus digenjot. Saat ini petugas tengah memasang tiang pancang untuk fondasi. Karena flyover cukup panjang, pembangunan fondasi akan memakan waktu yang lumayan lama. Rencananya, panjang flyover Krian mencapai 700 meter ditambah masing-masing 100 meter di kanan dan kiri untuk turunan. Total semuanya adalah 900 meter.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Dwi Eko Saptono mengatakan, di sisi utara flyover tiang pancang sudah terpasang. "Saat ini pekerja masih menuntaskan fondasi, sehingga jalan Kyai Mojo di lokasi pembangunan flyover tersebut masih dibuka setengah," katanya. Belum sampai ada penutupan total. Rencananya,

penutupan jalan secara total baru dilakukan tahun depan saat pekerjaan badan flyover dilakukan.

"Kami sudah koordinasi dengan pelaksana proyeknya. Rencananya ada penutupan total saat mulai pekerjaan struktur atau badan jembatan," ungkapnya. Saat ini jalan masih dibuka setengah karena pihaknya sudah memastikan pemasangan tiang pancang tidak mengganggu seluruh Jalan Kyai Mojo.

Saat penutupan total tahun depan, harapannya kemacetan sudah terurai di Jalan Kemangsen yang saat ini sudah hampir selesai dibeton. "Jadi, nanti Jalan Kemangsen pas sudah selesai dan bisa dilewati. Harapannya bisa jadi jalan alternatif tambahan sehingga tidak menambah kemacetan," paparnya. Namun, Dwi menyebut akan

meninjau sebelum melakukan penutupan total. "Kami dengan pelaksana sepakat, apabila masih memungkinkan dan tidak mengganggu keselamatan, jalan tidak ditutup total," ujarnya. Asalkan, aman baik untuk pengendara maupun pekerja. "Jadi, tidak seterusnya ditutup total. Momen tertentu saja saat dirasa pekerjaan akan membahayakan jika jalan tidak ditutup," terangnya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Sidoarjo jika nantinya ada penutupan total. Agar ada pengaturan lalu lintas dan penunjuk arahnya.

Dwi mengungkapkan, saat ini flyover tersebut sudah terbangun sesuai target. Akhir Desember 2023 seluruh pembangunan tuntas sehingga sudah bisa dilewati pada tahun baru 2024. (uzl/c17/any)

SEPUTAR FLYOVER KRIAN

- Proyek multiyear Kementerian Perhubungan RI
- Anggaran pembangunan senilai Rp 157 miliar
- Panjang jalan layang 700 meter dari selatan ke utara, ditambah 100 meter masing-masing ujung untuk turunan flyover
- Dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- Melintas di atas rel kereta api Km 38+897 lintas Surabaya-Solo mulai Jalan Raya Moh. Yamin hingga Jalan Kyai Mojo, Krian
- Pembangunan ditarget tuntas Desember 2023

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

Pemkab Genjot Pembangunan Sektor Wisata

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus menggenjot pembangunan sektor wisata karena mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), baik melalui devisa maupun perputaran ekonomi.

Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan, pembangunan pariwisata memiliki arti yang sangat penting ditinjau dari berbagai aspek. "Dari sisi ekonomi pariwisata, dalam beberapa tahun terakhir sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap PDB, baik melalui devisa maupun perputaran ekonomi," katanya saat peresmian destinasi wisata susur sungai sekaligus peresmian Kafe Kalitekung di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

Ia mengatakan sektor pariwisata juga dapat membuka peluang usaha jasa, baik langsung maupun tidak langsung, dan membuka peluang kerja

yang sangat banyak. Sehingga, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa Tambak Cemandi dan sekitarnya.

"Program desa wisata tidak lepas dari program Presiden RI Joko Widodo. Wisata desa menjadi salah satu prioritas Presiden, terutama di tahun 2023. Warga diarahkan untuk berwisata di desa-desa, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," katanya.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen membantu proses pengembangan wisata, salah satunya karang taruna. "Harus dikembangkan berkelanjutan, tidak berhenti di sini, potensi lingkungan masih alami. Banyak jenis hewan dan burung ada di sini, bisa dijadikan wisata edukasi anak-anak," ujarnya.

Seusai peresmian Kafe Kalitekung, dirinya bersama dengan pemangku kepentingan setempat berkesempatan me-

nyusuri sungai yang rindang dengan tanaman bakau di tepi sungai.

"Melihat destinasi wisata susur sungai ini menurut saya potensinya sangat besar. Kondisi alam masih alami, sangat cocok sebagai wisata keluarga di tengah hiruk pikuk," ucapnya.

Perahu dengan kapasitas 12 penumpang menjadi moda transportasi wisata susur sungai. Dua armada perahu berwarna putih ini merupakan BUMDes Desa Tambak Cemandi.

Kepala Desa Tambak Cemandi Khoirudin berharap dengan hadirnya wisata susur sungai ini, Desa Tambak Cemandi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu wisata tersebut dapat menjadi ikon Desa Tambak Cemandi.

"Dengan adanya wisata susur sungai dan Kafe Kalitekung ini, semoga ke depan masyarakat Desa Tambak Cemandi tambah makmur dan sejahtera," ujarnya. (udi)



BM/ST

SUSUR SUNGAI: Destinasi wisata susur sungai di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

CS Dipindai dengan CamScanner

Andalkan Suasana Alami

Wabup Sidoarjo Resmikan Desa Wisata Susur Sungai Tambakcemandi Sedati

Sidoarjo, Memo X

Pemkab Sidoarjo terus menggenjot pembangunan di sektor pariwisata. Bukan tanpa sebab, di sektor pariwisata dalam beberapa tahun terakhir memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), baik melalui devisa maupun perputaran ekonomi.

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi saat Peresmian Destinasi Wisata Susur Sungai sekaligus Peresmian Cafe Kalitekung, Desa Tambakcemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Minggu (27/11/2022). Turut Hadir dalam acara itu, Camat Sedati Abu Dardak, Forkopimka Sedati dan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Sedati.

"Pembangunan pariwisata memiliki arti yang sangat penting ditinjau dari berbagai aspek. Dari sisi ekonomi pariwisata dan dalam beberapa tahun terakhir sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap PDB. Baik melalui devisa maupun perputaran ekonomi," ujar Wabup Sidoarjo, Subandi, Minggu (27/11/2022).

Selain itu, lanjut Subandi, di sektor pariwisata juga dapat membuka peluang usaha jasa pariwisata, baik langsung maupun tidak langsung. Sekaligus membuka peluang kerja. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa Tambakcemandi dan sekitarnya. Program



RESMIKAN - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi saat Peresmian Destinasi Wisata Susur Sungai sekaligus Peresmian Cafe Kalitekung, Desa Tambakcemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Minggu (27/11/2022).

Desa Wisata ini juga tidak lepas dari program Presiden RI, Joko Widodo.

"Wisata desa menjadi salah satu prioritas Presiden, terutama di Tahun 2023. Warga diarahkan untuk berwisata di desa-desa, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," jelas Subandi yang juga mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.

Dalam kesempatan itu, Subandi mengajak seluruh elemen membantu proses pengembangan wisata. Salah satunya karang taruna. Potensi di Desa Tambakcemandi cukup besar ditambah lagi masih alami.

"Ini harus dikembangkan

berkelanjutan. Tidak berhenti di sini, karena potensi lingkungan masih alami. Banyak jenis hewan dan burung ada bisa dijadikan wisata edukasi anak-anak," pintanya.

Seusai peresmian Cafe Kalitekung, Subandi bersama Camat Sedati, Kades Tambak Cemandi dan Forkopimka berkesempatan menyusuri sungai yang rindang dengan tanaman mangrove di tepi sungai itu.

"Melihat Destinasi Wisata Susur Sungai ini saya menilai potensinya sangat besar. Kondisi alam masih alami dan sangat cocok sebagai wisata keluarga di tengah hiruk pikuk kota," ucap Subandi.

Sementara Perahu dengan kapasitas 12 penumpang menjadi moda transportasi wisata susur sungai. Dua armada perahu berwarna putih ini menjadi Bumdes Desa Tambakcemandi.

Sementara Kepala Desa (Kades) Tambakcemandi, Khoirudin berharap dengan hadirnya wisata susur sungai ini, Desa Tambakcemandi lebih dikenal masyarakat luas. Selain itu, wisata ini dapat menjadi ikon Desa Tambakcemandi.

"Dengan adanya Wisata Susur Sungai dan Cafe Kalitekung ini, semoga ke depan masyarakat Desa Tambakcemandi tambah makmur dan sejahtera," pungkasnya. (par/wan)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hari Ini Sampaikan Usulan UMK Sidoarjo ke Gubernur

SIDOARJO - Besaran upah minimum kabupaten (UMK) Sidoarjo tahun 2023 sampai saat ini belum diputuskan. Meski, *deadline* penentuan UMK daerah mundur dari 30 November menjadi 7 Desember. Rencananya, hari ini (29/11) usulan UMK Sidoarjo 2023 baru disampaikan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Hanya, hingga tadi malam, belum ada keputusan nominal UMK yang akan disampaikan ke gubernur.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan, pembahasan bersama dengan pengusaha dan buruh sudah dilakukan. Namun, belum ada titik temu kesepakatan nilai upah. Pengusaha maupun buruh

memiliki hitungan tersendiri. Nantinya, gubernur Jatim yang memutuskan besaran UMK Sidoarjo. "Sekarang masih di tangan Pak Bupati," ujarnya.

Berita acara hasil rapat dan nilai usulan dari buruh dan pengusaha disampaikan semua. Yang jelas, Ainun menyebut Pemkab Sidoarjo ingin UMK 2023 tidak memberatkan bagi pengusaha, juga menyejahterakan para buruh. "Harus juga mempertimbangkan situasi dan kondisi perusahaan," ucapnya. Jangan sampai UMK terlampau tinggi sehingga membuat banyak lapangan pekerjaan tertutup. Apalagi, sampai saat ini sudah banyak perusahaan yang tutup.

Berdasar data Disnaker Sidoarjo, ada 261 badan usaha dan industri yang tutup. "Tutup itu bukan berarti tutup perusahaannya ya, tapi sudah tidak di Sidoarjo lagi," ungkapnya. Bisa memang sudah tidak beroperasi atau pindah ke daerah lain. "Itu perhitungan selama 2022 saja. Sejak awal tahun sampai saat ini," ujarnya. Jumlah itu meliputi perusahaan skala menengah, besar, dan kecil.

Ainun menyebut, pemerintah tidak sekadar memikirkan kenaikan upah. Namun, bagaimana keberlangsungan perusahaan agar tidak sampai ada PHK massal.

Kabid Hubungan Industrial (HI) Sidoarjo Anwar Khoifin mengatakan, berita acara rapat bersama

elemen pengusaha dan buruh yang disampaikan ke bupati Sidoarjo akan diusulkan ke gubernur Jatim. "Semua disampaikan, dari versi pengusaha maupun buruh. Sesuai berita acara," ujarnya.

Saat ini, nominal yang akan diusulkan ke gubernur belum final. Rencananya, nominal diputuskan hari ini.

Sesuai rapat sebelumnya, pengusaha ingin tidak ada kenaikan UMK pada 2023. Sebaliknya, buruh ingin kenaikan 13 persen dari UMK Sidoarjo saat ini.

Sementara itu, gubernur Jatim kemarin menetapkan UMP Jatim 2023 sebesar Rp 2.040.244. UMP Jatim 2023 naik 7,86 persen dari UMP 2022 sebesar Rp 1.891.567. (uzi/c17/any)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sudah Aktivasi 12.500 Identitas Kependudukan Digital

SIDOARJO - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini sudah mengaktivasi 12.500 identitas kependudukan digital (IKD). Namun, jumlah itu masih berasal dari ASN, pegawai non-ASN, dan perangkat desa. Masyarakat umum yang akan aktivasi baru bisa tahun depan.

"Total sudah 12.500. Sampai akhir tahun ini kami masih fokus ASN, non-ASN, dan perangkat desa. Tahun depan baru mahasiswa dan masyarakat," papar Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma kemarin.

Namun, ada sebagian masyarakat umum yang saat ini sudah aktivasi. "Masyarakat umum yang sudah aktivasi ini mereka yang bermohon KTP karena hilang, rusak, atau perubahan elemen. Kami langsung aktivasi IKD mereka," jelasnya.

Reddy mengatakan, aktivasi tersebut dilakukan bertahap agar tidak sampai terjadi antrean yang membeludak. Selama ini, pihaknya langsung men-

datangi langsung ke lokasi ASN/non-ASN bekerja. Misalnya, aktivasi dilakukan langsung di dinas pemuda dan olahraga, dinas kesehatan, dan lainnya.

Nantinya, seluruh warga Sidoarjo bisa mendapatkan IKD. Sebab, dengan IKD, masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika fisik KTP elektronik tertinggal atau lupa tidak membawa. Karena KTP elektronik sudah tersimpan secara digital. Data diri lengkap sudah ada dalam IKD.

Reddy menyatakan, sebelum masyarakat umum melakukan aktivasi IKD, mereka harus *download* aplikasi IKD di Play Store. Setelah *download*, warga bisa melakukan registrasi dengan NIK, *e-mail*, nomor *handphone*, dan lainnya. "Step pertama unduh dulu, baru setelah itu melakukan aktivasi di dispendukcapil," katanya.

Petugas dispendukcapil akan mengarahkan saat aktivasi. Aktivasi harus dilakukan langsung di kantor dispendukcapil karena ada verifikasi langsung oleh petugas. (uzi/c17/any)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



BERITA HL

SIAGA: Pemkab Sidoarjo menyiagakan petugas Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas terkait untuk membantu warga terdampak banjir.

Petugas BPBD Siaga Bantu Warga Terdampak Banjir

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiagakan petugas Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas terkait untuk membantu warga yang terdampak banjir.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor mengatakan, luapan air sungai Tanggulangin sampai Balongdowo menimbulkan banjir di beberapa desa di Kecamatan Candi dan Tanggulangin.

"Tingginya debit air yang datang dari barat ditambah hujan deras beberapa hari kemarin akhirnya sungai tidak mampu menampung volume debit air," kata Bupati, yang biasa disapa Gus Muhdlor.

"Rumah warga yang terdampak banjir rata-rata yang dekat dengan aliran sungai.

Seperti di Desa Balonggabus Kecamatan Candi, Perumahan Bumi Candi Asri, Desa Ngampelsari, dan Desa Sumorame, dan Desa Boro," ia menambahkan.

Bupati sudah menginstruksikan BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga pemerintah kecamatan untuk bergerak membantu warga yang terdampak banjir.

Selain itu, dia menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air menyedot genangan air di daerah terdampak banjir serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengendalikan debit air di DAM Rolag Songo di Kecamatan Tarik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati sudah mengecek penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di desa terdampak banjir.

"Tenaga kesehatan kita siagakan semua untuk membantu masyarakat. Kemarin kita ke Desa Ganggangpanjang, kemudian ke Desa Boro menyalurkan bantuan obat-obatan dan popok bayi. Kita turun membantu dan melayani kesehatan warga," katanya.

"Perintah Bupati, Dinkes harus jadi garda terdepan membantu warga. Ini kita gerak cepat langsung turun bersama nakes. Semua puskesmas sudah saya minta siaga membantu warga," ia menambahkan. (udi)

CS Dipindai dengan CamScanner

THE JUSTICE NEWSPAPER'S LEADER
Berita Metro

Hujan Deras dan Angin Kencang, Reklame di Aloha Roboh Timpa Pikap dan Motor



GEDANGAN-Hujan deras disertai angin di kawasan Aloha, Senin (28/11) siang berdampak luar biasa. Sebuah papan reklame roboh di Jalan Raya Aloha arah Surabaya. Tak hanya itu, reklame sepanjang sekitar enam meter tersebut juga menimpa kendaraan yang melintas di lokasi kejadian.

Kanit Turjawali Satlantas Polresta Sidoarjo Iptu Abdul Kholil mengatakan, reklame tersebut roboh usai diterjang hujan deras disertai angin kencang. Reklame dengan lebar sekitar empat meter itu me-

nimpa motor dan mobil.

"Karena robohnya ke badan jalan. Jadi menimpa kendaraan. Ada lima motor dan satu pikap yang terkena robohan reklame itu," katanya

Papan reklame menimpa pikap nopol L 9230 GJ. Meski begitu, pengemudi pikap tersebut dipastikan dalam keadaan selamat. Sementara pengendara Honda Vario L 5589 KI sempat terjepit reklame yang roboh.

Akibat kejadian tersebut, pengemudi motor, Ramadhan, 42, harus dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Sebab korban mengalami cedera patah kaki.

"Sementara pengendara motor lainnya berhasil selamat. Tapi seluruh kendaraan yang tertimpa reklame dibawa ke Polsek Gedangan," imbuhnya.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Sidoarjo Iptu Ony Purnomo mengatakan, beberapa korban yang tertimpa reklame memang dibawa ke Mapolsek Gedangan. Sebab kejadian itu ditangani Polsek Gedangan.



AMBRUK: Kondisi papan reklame roboh saat hujan deras disertai angin kencang. Satu pemotor patah kaki karena tertimpa reklame (foto kanan).

CS Dipindai dengan CamScanner



Hujan Deras...

Kanit Reskrim Polsek Gedangan Ipda Roni Endratmoko mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan para korban yang tertimpa reklame.

CS Dipindai dengan CamScanner



Pihaknya juga tengah menuju rumah sakit untuk meminta keterangan korban.

"Kami menuju ke RSI Jemursari Surabaya untuk melihat kondisi korban terlebih dahulu. Masih kami selidiki," jelasnya. (far/vga)

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



LANCAR: Pekerja sedang memperbaiki gorong-gorong di depan SMAN 2 Sidoarjo.

HENDRIK MUCHLISONAGAR SIDOARJO

Cegah Banjir di Kawasan SMAN 2, Gorong-Gorong Gading Fajar Diperbaiki

KOTA-Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo terus berupaya meningkatkan infrastruktur yang layak di pusat Kota Sidoarjo. Salah satunya dengan memperbaiki gorong-gorong di depan SMAN 2 Sidoarjo.

Kabid Irigasi dan Pematuan Dinas DPUBMSDA Sidoarjo Rizal Asnan mengungkapkan, pembangunan gorong-gorong di kawasan Gading

Fajar itu juga telah mulai dikerjakan. Dinas mengalokasikan anggaran sekitar Rp 190 juta untuk proyek tersebut. "Itu untuk memperlancar saluran air di lokasi itu," katanya.

Proyek itu termasuk pengerjaan ringan. Nilai tidak sampai di atas Rp 200 juta. DPUBMSDA juga tidak sampai melelang pengerjaan itu, tapi melalui mekanisme penunjukan langsung.

Dari pantauan Radar Sidoarjo, Senin (28/11) sejumlah pekerja juga nampak beraktivitas di lokasi itu. Mereka mulai mengeruk tanah dan membongkar paving di depan SMA Negeri tersebut.

Dengan perbaikan itu diharapkan pembuangan air di lokasi itu bisa lebih lancar. Sehingga tidak sampai menimbulkan banjir dan genangan air di kawasan itu. Apalagi saat ini

masuk musim penghujan. Tentu akan membuat tidak nyaman pengguna jalan yang melintas jika kawasan itu terendam banjir.

Selain memperbaiki gorong-gorong, DPUBMSDA Sidoarjo juga gencar menormalisasi sejumlah sungai di Sidoarjo. "Dengan harapan bisa meminimalisir terjadinya banjir di puncak musim penghujan," pungkas Rizal. (son/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Nakes Se-Jatim Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Surabaya, Memorandum

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law masih menjadi perdebatan. Kali ini, ratusan tenaga medis dari berbagai ikatan profesi kesehatan di Jawa Timur melakukan aksi di DPRD Jatim, Senin (28/11).

Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur (IDI Jatim) Dr dr Sutrisno SpOG (K) menyampaikan, mereka datang ke gedung DPRD Jatim untuk menyuarakan kekhawatiran terkait RUU yang kabarnya telah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas DPR RI. Mereka kompak menyampaikan keberatan dalam audiensi di DPRD Jatim. Ratusan tenaga kesehatan ini memakai pengikat kepala bertuliskan penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law.

Dr dr Sutrisno SpOG(K) se usai pertemuan mengatakan, pihaknya sebagai organisasi profesi tidak dilibatkan dalam pembahasan naskah akademik terkait RUU Kesehatan Omnibus Law.

Para tenaga kesehatan ini mengaku membaca draf yang muncul di internet. "Dan isinya, pasal demi pasal kami analisis memang luar biasa penuh koreksi," katanya.

Dalam draf RUU, terkait profesi yang dikesampingkan. Padahal, lanjutnya, baik dokter, perawat dan seluruh nakes sangat penting untuk menjaga integritas dan etik. "Jika pelayanan kesehatan tidak punya etik, sungguh berbahaya," lanjutnya.

Disisi lain, dia juga mengaku khawatir potensi mudah masuknya tenaga kesehatan asing. Belum lagi, konsentrasi peraturan itu sesuai draft yang beredar hampir mayoritas bakal terfokus pada Kementerian Kesehatan. "Tentu saja, menurut saya itu tidak mungkin Kemenkes bisa mengurus semua ini," terangnya.

Di Jawa Timur saja, 60 hingga 65 persen rumah sakit adalah swasta. "Dari 20 ribu dokter di Jawa Timur saja yang pegawai negeri itu tidak sampai sepertiga. Artinya, peranan organisasi profesi sangat penting," tambahnya.

Para tenaga kesehatan berharap lebih baik regulasi yang telah ada disempurnakan. Lebih lanjut dia berharap nantinya mereka dapat dilibatkan dalam penyusunan regulasi. "Aspirasi ke DPRD Jatim untuk disampaikan ke tingkat pusat," ucapnya.



Suasana hearing antara pimpinan DPRD Jatim dengan ratusan nakes.

Ratusan tenaga medis itu diterima pimpinan DPRD Jatim dan sejumlah anggota. Diantaranya, dua orang Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan Anik Maslachah. Wakil Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih dan dua orang anggota yakni Hadi Dedyansah serta Mathur Husyairi. Selain itu, turut hadir anggota DPRD Jatim lainnya, Freddy Poernomo, Ahmad Iwan Zunaih dan Muzammil Syafii.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengata-

kan, secara otentik pihaknya memang belum menerima draft RUU tersebut. Sekalipun demikian, Sahat memastikan bakal meneruskan sejumlah aspirasi yang disampaikan nakes di Jawa Timur kepada pemerintah pusat maupun DPR RI.

"Tugas kami untuk menerima dan juga mendengarkan aspirasi dan menjadi tugas kami untuk meneruskan berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kekhawatiran mereka," kata Sahat. (day/ono)

Dipindai dengan CamScanner

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Polresta Sidoarjo Bermunajat untuk Keselamatan Bangsa

Sidoarjo, Memorandum

Sejumlah ulama, masyarakat, dan anggota Polri bermunajat berdoa untuk keselamatan bangsa atas bencana alam yang melanda Kabupaten Cianjur maupun beberapa tempat lainnya.

Munajat dan doa bersama untuk keselamatan bangsa tersebut, diadakan Majelis Maulid Wat Ta'lim Riyadlul Jannah Sidoarjo, Minggu (27/11) malam, di Masjid Al Ikhlas Polresta Sidoarjo.

Kegiatan dihadiri Habib Muhammad Ali Baraqbah, Habib Husein Alaydrus, Habib Salim Alaydrus, Habib Naqib Alaydrus, Habib Syeikh Assegaf dan sejumlah ulama atau habib lain dengan 300 jemaah.

Habib Muhammad Ali Baraqbah mengatakan, dengan bermunajat kepada

Allah SWT para ulama mengajak jemaah termasuk anggota polisi Polresta Sidoarjo diberi keselamatan dan kesehatan dalam tugasnya.

Ia berharap, segala musibah maupun bencana yang menimpa Negeri kita dapat segera membaik. "Semoga kita semua diberi kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi ujian Allah," ujarnya.

Terkait kegiatan munajat dan doa bersama yang diadakan Majelis Maulid Wat Ta'lim Riyadlul Jannah tersebut, Iptu Kolil dari Takmir Masjid Al Ikhlas mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas kegiatan religi ini.

"Harapannya, dengan memohon kepada Allah kita semua senantiasa diberi perlindungan-Nya," pungkasnya. (jok/mik)

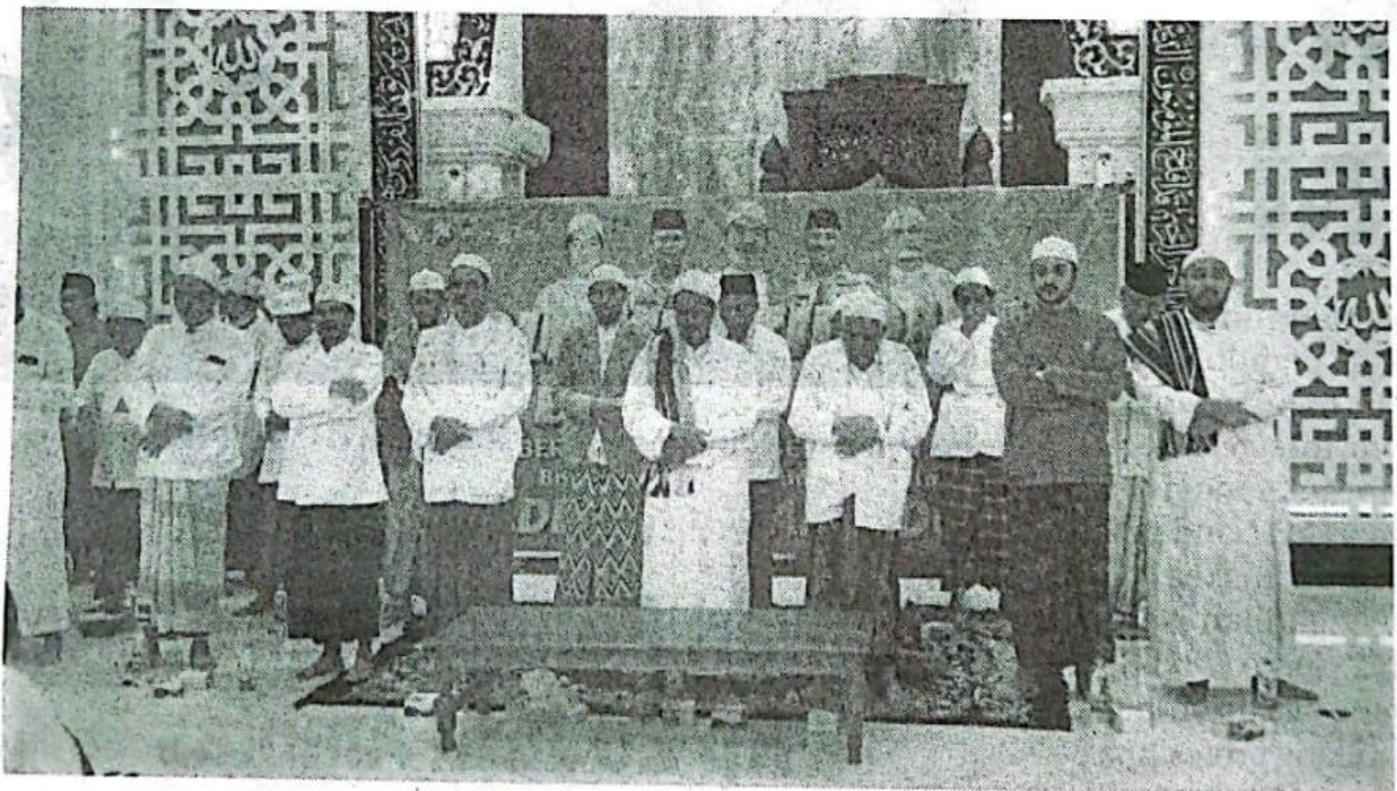


FOTO: MEMORANDUM/BWO

Ulama, warga, dan polisi berdoa bersama agar dihindarkan dari bahaya dan malapetaka untuk keselamatan bangsa.

CS Dipindai dengan CamScanner

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Warga Kecamatan Gedangan, Terima Tiga Bantuan Pemerintah Pusat Sekaligus

Sidoarjo, Bhirawa

Tiga bantuan dari Pemerintah Pusat, yakni BLT BBM, PKH atau program keluarga harapan dan BPNT atau bantuan pangan non tunai, Senin (28/11) kemarin, diterima sekaligus oleh warga miskin yang ada di 15 desa yang ada di Kec Gedangan. Pembagian di kecamatan padat penduduk itu, dipusatkan di 4 desa. Yakni di balai Desa Tebel, balai Desa Wedi, balai Desa Keboanom dan balai Desa Sawotratap.

Sekretaris Kec Gedangan, Ardhi Aninidhita SSTP MAp, menyampaikan total 3 jenis bantuan itu di Kec Gedangan, pada tahun 2022 ini diberikan kepada sebanyak 2.739 keluarga penerima manfaat atau KPM. Sedangkan total se Kab Sidoarjo diterima oleh sebanyak 87.604 KPM.

Untuk bantuan PKH ada 722 KPM, bantuan PKH ada 240 KPM dan bantuan pangan non tunai (BPNT) ada 1.777 KPM. Nilai bantuan yang diterima, untuk jenis BLT BBM sebesar Rp300 ribu per KPM, BPNT sebesar Rp600 ribu per KPM dan bantuan PKH tiap KPM tidak sama. "Alhamdulillah, pendistribusian hari ini berjalan lancar," kata Ardhi, kemarin, saat dihubungi. [kus.ca]

CS Dipindai dengan CamScanner

HARIAN
Bhirawa
Makalah Bhirawa



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Siswa Smanor Jatim Berdemo Minta Kepala Sekolahnya Diganti

Sidoarjo, Bhirawa

Usai apel pagi Senin (28/11) kemarin puluhan siswa Smanor (SMA Negeri Olah Raga) melakukan demonstrasi, melakukan orasi di halaman sekolahnya. Mereka membawa kertas karton dengan berbagai tulisan berisi kecaman soal kebijakan Kepala Sekolah. Mereka juga menggelar orasi agar kepala sekolah dalam memberikan kebijakan lebih realistis.

Diantara tulisan kecaman itu, Smanor Anti Ruwet, Target Elit Jatah Sulit, Salat Kok Diundur - undur, Sekolah Elit Air Sulit. Jangan Ubah Waktu Salat Kita, Kita Butuh Disayang Bukan Dikekang. Dikekang Juara Tanpa Biaya, Stop Intimidasi, Cukup Rambut Kami yang dDipangkas Hak - hak Kami Jangan Dipangkas.

Siswa kelas XII Atletik, M Risqi Ferdiansyah, sebagaimana dalam

orasi mengatakan, para siswa menyatakan kalau kepala sekolah yang sekarang masih di Smanor, para siswa tidak akan masuk sekolah.

Risqi juga mengungkapkan, banyak hak - hak siswa yang hilang. Contohnya buku perpustakaan, jatah sabun juga tidak ada. Bahkan para siswa juga dituntut

seperti SMA Taruna dan SMA Gresik, padahal di Smanor ini mempunyai tujuan sendiri.

"Tujuan kami sekolah di Smanor ini menjadi atlet, bukan menjadi ang-

gota TNI atau Taruna. Yang lebih miris adzan untuk pertanda waktu salat dhuhur pun tidak diperbolehkan tepat waktu. Pernah kejadian adzan dhuhur tepat waktu tetapi langsung diberhentikan salah satu guru atas perintah kepala sekolah. Kondisi ini sudah lama, kalau seperti tekanan - tekanan dan sering diancam dikeluarkan dari sekolah itu mulai dari saya sejak kelas XI," terang Risqi.

Kepala Smanor Jatim, Suswanto, mengaku sudah siap untuk mengundurkan diri. Ia mengaku sudah ingin mundur dari Smanor Jatim ini sejak Pebruari 2022 yang lalu. Saat ditanya ada kendala apa sampai terjadi demo? "Nanti saja tanyakan sendiri ke Dinas Pendidikan Jatim. Karena soal keterkaitan dana itu pihak dinas yang berwenang. Aku lo buruhne," ungkap Suswanto. [ach.fen]



Dipindai dengan CamScanner

HARIAN
Bhirawa
Media Online Sidoarjo